



**SUMBER BERITA**

**RABU, 15 JANUARI 2020**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Wali Kota Minta Kejelasan Pantai Panjang**

**BENGKULU, BE** - Munculnya pengelolaan lahan Pantai Panjang dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, membuat Wali Kota Helmi Hasan beraksi.

Dalam catatan tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu tidak memiliki hak pengelolaan lahan Pantai Panjang dan Taman Remaja sehingga berpotensi kehilangan PAD Rp 1,15 miliar. Hal ini dikarenakan masih tumpang tindih antara

Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu.

"Pantai Panjang sampai hari ini juga semuanya nggak jelas, soal kebersihan baru menyalahkan kota, tapi soal ada yang membangun diklaim provinsi punya mereka. Hal-hal seperti ini perlu diluruskan," kata Helmi Hasan saat menghadiri rapat penyerahan LHP di Kantor BPK RI Provinsi Bengkulu, kemarin (14/1).

► *Baca Wali ...Hal 13*

Untuk diketahui, sebelumnya pengelolaan Pantai Panjang resmi dibawah naungan Pemkot, namun pada tahun 2018 lalu Caretaker Walikota Bengkulu, H Budiman Ismaun mengalihkan status pengelolaan Pantai Panjang ke Pemprov.

Kebijakan tersebut sempat menimbulkan gejolak karena dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan anggota DPRD kota terkait pengalihan aset.

Adapun dasar yang pengalihan ini yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang wilayah cagar alam atau taman wisata alam, pengelolaannya diserahkan ke pemerintah provinsi.

Namun, karena provinsi tidak memiliki wilayah dan bersifat administratif, pengelolaan diserahkan kepada pemkot dan pemkab.

Namun di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah juga mengatur bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima pengalihan aset tersebut.

Oleh sebab itu, Helmi sangat menyayangkan tidak adanya upaya dari Pj Walikota kala itu untuk mempertahankan aset-aset yang terjaga dengan baik selama ini. (805)